



SUMBER BERITA

RABU, 2 OKTOBER 2018

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Aksesoris Mobnas Diduga Digelapkan

**Camat Sengaja
Tukar Velg**

PELABAI - Tampaknya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong perlu menata kembali penggunaan kendaraan dinas, terutama mobil dinas (mobnas). Belakangan, banyak kendaraan dinas milik Pemkab Lebong yang onderdilnya sengaja ditukar oleh pemakainya. Salah satunya mobil dinas (mobnas) Toyota Rush nopol BD 1396 HY, yang dipakai Camat Rimbo Pengadang, JP.

Velg standar mobil warna putih itu ditukar dengan velg kaleng

yang kualitasnya jauh dibawan bawaan pabrikan mobil Toyota. Terindikasi velg standar kendaraan itu sengaja dipindahkan ke mobil lain yang termasuk sebagai tindakan penggelapan barang inventaris negara. "Tidak ada koordinasi ke kami terkait penggantian velg itu," ujar Kabag Umum dan Perlengkapan, Sekretariat Kabupaten (Setkab) Lebong, Kosasih Effendi, M.Pd melalui Kasubbag Perlengkapan, Rizka Putra Utama, M.Si.

Bagian Umum dan Perlengkapan koordinasi ke Pemkab Lebong melayangkan surat teguran ke pengguna. Intinya kondisi

mobnas pengadaan tahun 2016 bekas operasional anggota DPRD Lebong itu harus segera dikembalikan seperti semula saat serah terima pinjam pakai.

"Dalam berita acara pinjam pakai sudah jelas dicantumkan, tidak boleh merubah bentuk maupun menukar aksesoris kendaraan," terang Putra.

Lain cerita untuk penggantian part yang rusak. Versi Rizka, justru setiap pengguna diwajibkan melakukan pemeliharaan rutin kendaraan dinas yang dipinjamkan. Namun untuk penggantian kelengkapan penunjang tanpa alasan yang jelas serta tidak koor-

dinasi ke Bagian Umum dan Perlengkapan, haram hukumnya.

"Memodifikasi kendaraan dinas agar tampilannya menjadi lebih baik saja tidak dibenarkan, apalagi memperburuk bentuk dan kualitasnya," ungkap Putra.

Tidak dipungkirinya, Bagian Umum dan Perlengkapan akan menempuh langkah tegas menjeret pelaku penukaran aksesoris kendaraan dinas ke ranah hukum. Khususnya bagi pelaku yang mengambil keuntungan dari tindakan penukaran itu. "Tindakan seperti itu sama saja menggelapkan aset negara," tandas Putra. (sca)